PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (*PERFORMANCE BASED BUDGETING*) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ACEH

Ananta Yulia Romenda¹, Endang Surasetyo Ningsih^{*2}

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

e-mail: anantayulia15@gmail.com¹, endangsnt@unsyiah.ac.id²

* Corresponding Author

Abstrak

Performance-based budgeting aims to show the relationship between funding and performance to be achieved, increase efficiency and transparency in budgeting, increase flexibility and accountability of units in carrying out tasks and budget management. This study aims to: (1) Know the system of implementing performance-based budgeting in the management of regional finances in the Aceh Work Unit (SKPA) and (2) Knowing the obstacles faced in implementing a performance-based budgeting system in the management of Aceh's regional finances. This research uses a qualitative approach and descriptive research type. The population in this study were all (42) Aceh Work Unit (SKPA) which is the organizer of government activities to manage regional finances. The sample in this study is the entire population (total sample). Data collection uses structured interview techniques. Data were analyzed qualitatively. The results of the study show that: (1) Performance-based budgeting system implementation in regional financial management in the Aceh Work Unit (SKPA) is in accordance with applicable regulations both from the RPJMA that refers to the RPJN until the final process of the birth of the DPA SKPA and with the Aceh Government Performance Report and (2) Constraints faced in implementing a performance-based budgeting system in the management of Aceh's regional finances are internal, such as the limitations of Human Resources (HR) in the budget and external fields such as rewards and punishments from local governments to improve the performance of their employees. Conclusions: (1) Performance-based budgeting system implementation in regional financial management in the Aceh Apparatus Work Unit (SKPA) is in accordance with applicable regulations (2) Constraints faced in implementing performance-based budgeting system in Aceh regional financial management are both internal and external.

Keywords: *Budget Implementation, Performance Based, Regional Financial Management*

1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan merupakan sebagian rangkaian kegiatan manajemen yang dilakukan untuk mengatur keuangan yang ada pada pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada era otonomi dan reformasi anggaran berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 telah menggunakan Sistem Anggaran berbasis kinerja, sehingga dalam menyusun anggaran daerah dalam pengelolaan keuangan daerah harus menggunakan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja. Anggaran sendiri merupakan alat dalam pengelolaan keuangan daerah yang digunakan untuk menentukan besaran pendapatan serta pengeluaran, membantu dalam pengambilan keputusan, dan serta perencanaan pembangunan. Dari penjelasan tersebut dapat

disimpulkan bahwa anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah sangatlah penting. Yang mana bila sistem penganggaran yang dilaksanakan tersebut baik, maka pastinya pengelolaan keuangan daerah juga baik.

Tujuan dari anggaran berbasis kinerja sendiri adalah guna menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran, meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran. Penganggaran berbasis kinerja menjadikan pengelolaan keuangan daerah lebih bermanfaat, dikarenakan dana yang dikeluarkan lebih jelas penggunaannya melalui *output* dan *outcome* yang dihasilkan.

Menurut Qanun No.1 Tahun 2008, Pengelolaan Keuangan Aceh adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan pemeriksaan. Pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berasaskan efektivitas pengelolaan keuangan publik dari sisi pendapatan dan belanja. Efektivitas pengelolaan daerah dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: 1). Penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya, seperti pengesahan anggaran untuk SKPA dan penyampaian laporan keuangan tepat waktu. 2) penyelesaian kegiatan dalam batas anggaran yang tersedia. 3) pencapaian sasaran dan tujuan sesuai dengan rencana, seperti tingginya persentase daya serap (realisasi) APBA serta adanya peningkatan opini BPK atas LKPD menjadi WTP. Efektivitas merupakan salah satu sistem penilaian yang dapat digunakan oleh suatu organisasi (lembaga) untuk mengukur keberhasilan dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan (Fedry, et. all. 2015).

Berdasarkan uraian pada fenomena dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang telah di jelaskan diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh”**.

Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Terdapat dua ruang lingkup atau fokus dalam penelitian ini, yang pertama adalah penulis ingin memperoleh pemahaman serta melihat secara mendetail tentang penerapan anggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah Aceh, bagaimana penerapan yang terjadi saat ini. Kedua, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi kendala- kendala apa saja yang dihadapi pada penerapan anggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah Aceh dengan mengambil studi kasus pada Satuan Kerja Perangkat Aceh dalam lingkup Pemerintahan Aceh.

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh dalam lingkup Pemerintahan Aceh seperti yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2006. Penelitian ini akan menganalisis penerapan anggaran berbasis kinerja dalam

pengelolaan keuangan dengan menggunakan metode wawancara yang akan dilakukan. Serta data yang berupa peraturan pemerintah dan lainnya sebagai pendukung dari penelitian ini.

2. Kerangka Teoretis

Pengelolaan Keuangan

Menurut PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di jelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) harus memberitahukan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menyusun serta menyampaikan rancangan Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) paling lambat selama tiga hari kerja usai APBD ditetapkan. Rancangan DPA-SKPD berisi rincian sasaran yang akan dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut, serta juga rencana penarikan dana pada tiap-tiap satuan kerja dan pendapatan yang diperkirakan.

Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 menyatakan bahwa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Didalamnya diatur mengenai bagaimana mengelola keuangan Negara dan daerah secara efektif dan efisien. Tak hanya itu, turunan dari pada Peraturan Pemerintah ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pada Permendagri No.54 Tahun 2010 mengatur tentang kewajiban daerah dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan Renstra SKPD, Renja SPKD, serta RKPD.

Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan metode penaganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatankegiatan dengan manfaat yang dihasilkan (Danila et al, 2018).

Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang telah dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan pencapaian atas target kinerja yang telah ditentukan sebelumnya, yang diharapkan menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi didaerah (Abdullah, 2018:35). Penganggaran berbasis kinerja sendiri merupakan penganggaran yang menghubungkan tiap pendanaan yang di cantumkan dalam pengeluaran (output) dengan hasil yang dicapai (outcome) didalamnya termasuk efisiensi, efektivitas, dan ekonomi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Sebenarnya, yang menjadi dasar munculnya sistem ini adalah dilatarbelakangi oleh mulai meningkatnya kepedulian serta kesadaran masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintahan saat ini menjadi sorotan semua masyarakat karena pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah haruslah memiliki manfaat bagi masyarakat banyak. Hal ini menjadikan dibutuhkan suatu pengukuran terhadap kinerja kepada para penyelenggara kegiatan. Adapun pengukuran tersebut dibuat untuk menilai seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu yang kemudian dibandingkan dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

Komponen Anggaran Berbasis Kinerja

Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program/kegiatan (Depkeu, 2009:15). Dijelaskan juga dalam buku pedoman penerapan anggaran berbasis kinerja yang dikeluarkan oleh Depkeu Tahun 2009 bahwa indikator kinerja yang digunakan terdiri dari Indikator Kinerja Utama Program (IKU Program) guna menilai kinerja program, indikator Kinerja Kegiatan (IK Kegiatan) untuk menilai kinerja kegiatan, dan Indikator Keluaran untuk menilai kinerja subkegiatan

(tingkatan di bawah kegiatan).

Standar Biaya

Standar biaya adalah perbandingan antara anggaran belanja dengan target kinerja yang juga dapat dinamakan dengan biaya rata- rata persatuan output. Serta standar biaya merupakan dasar untuk menilai kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, karena menunjukkan hubungan rasional antara input dan outputnya (Darise, 2009:123)

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja adalah proses penilaian serta pengungkapan masalah implementasi kebijakan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja, baik dari sisi efisiensi dan efektivitas dari suatu proram/kegiatan (Depkeu, 2009:16). Serta dijelaskan juga bahwa cara pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil terhadap target (dari sisi efektivitas) dan realisasi terhadap rencana pemanfaatan sumber daya (dilihat dari sisi efisiensi).

Unsur-Unsur Pokok Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (2008:14), unsur-unsur dari anggaran berbasis kinerja yaitu:

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses yang objektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan juga menggunakan informasi untuk menentukan keefektifan dan keefisienan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Konsekuensi anggaran berbasis kinerja tersebut menghubungkan antara renstra dengan penganggaran.

2. Penghargaan dan Hukuman (*Reward and Punishment*)

Pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja sulit dicapai dengan maksimal tanpa ditunjang dengan faktor-faktor yang dapat menunjang pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yaitu berupa penghargaan dan hukuman bagi para pelaksana anggaran.

Elemen Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan (2008:10), elemen-elemen utama anggaran berbasis kinerja adalah:

1) Visi dan Misi

Visi merupakan hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam waktu jangka panjang. Sedangkan misi merupakan gambaran bagaimana visi tersebut akan dicapai.

2) Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi. Tujuan digambarkan dalam RPJM nasional yang menunjukkan tahaan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut menggambarkan arah yang jelas dan juga tantangan yang masuk akal.

3) Sasaran

Sasaran merupakan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan dapat membantu penyusun anggaran untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu dan terukur. Sasaran yang baik dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria, seperti spesifik, dapat dicapai, terukur, relevan dan ada batasan waktu.

4) Program

Program merupakan sekumpulan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program dibagi menjadi beberapa kegiatan dan disertai dengan target sasaran output dan outcome.

5) Kegiatan

Kegiatan merupakan serangkaian pelayanan yang bertujuan untuk menghasilkan output dan outcome untuk mencapai suatu program.

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) (2009:20) penerapan anggaran berbasis kinerja yaitu meliputi:

1) Penyusunan Renstra, dilakukan sebelum melakukan penyusunan anggaran berbasis kinerja pada kementerian/lembaga. Substansinya adalah memberikan gambaran tentang tujuan organisasi dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut.

2) Sinkronisasi, dimaksudkan untuk:

a) Menyusun alur keterkaitan antara kegiatan dan program terhadap kebijakan yang mendasarinya.

b) Memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan benar-benar akan dapat menghasilkan output yang mendukung pencapaian kinerja.

c) Memastikan bahwa kinerja suatu program akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

d) Memastikan keterkaitan antara program dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah).

3) Penyusunan kerangka acuan, yang menggambarkan:

a) Uraian pengertian kegiatan dan mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan tugas pokok dan fungsi.

b) Satuan kerja yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran output dan siapa

c) sasaran yang akan menerima layanan dari kegiatan tersebut.

d) Rincian pendekatan dan jangka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Urusan singkat mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, serta uraian keterkaitan alur pemikiran antara kegiatan dengan program yang memayunginya.

e) Data sumber daya yang diperlukan, termasuk rincian perkiraan biayanya.

4) Penerapan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan komitmen kinerja yang dijadikan sebagai dasar atau kriteria dari penilaian kinerja. Indikator kinerja memberikan penggambaran tentang apa yang akan diukur dan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

5) Pengukuran kinerja. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menilai keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan. Maka dari itu, anggaran berbasis kinerja perlu didukung dengan akuntabilitas kinerja yang menunjukkan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan juga kegagalan dalam pengelolaan dan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dilakukan secara periodik dan diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

6) Pelaporan kinerja. Pertanggungjawaban kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang

disusun secara jujur, objektif, dan sasaran. LAKIP menguraikan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi serta sebagai bahan evaluasi bagi pihak yang berkepentingan.

Tahapan Kegiatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Penganggaran Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan serangkaian kegiatan yang utuh dan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Sehingga tahapan kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara keseluruhan. Adisasmita (2011:35) menjelaskan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Kegiatan- kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian terbesar dari anggaran daerah.

Anggaran daerah merupakan alat dalam pengelolaan keuangan daerah, yang digunakan untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran, membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Adisasmita (2011:50) menyatakan bahwa anggaran daerah merupakan bentuk kongkrit dari rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif dengan mengaitkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang untuk mencapai tujuan atau target tertentu dalam satu tahun anggaran.

3. Metode Penelitian

Populasi

Menurut Sugiyono (2017:118) populasi adalah generalisasi yang terdiri dari objek-objek maupun subjek yang mempunyai berbagai karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti sebelumnya untuk dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan oleh peneliti. Sedangkan menurut Kuncoro (2009:118) populasi merupakan kelompok elemen yang lengkap yang biasanya merupakan orang, objek, transaksi, maupun kejadian yang membuat kita tertarik untuk melakukan penelitian terhadapnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang merupakan penyelenggara kegiatan pemerintahan untuk

mengelola keuangan daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian unsur yang sangat penting dalam penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan menjawab pertanyaan dari masalah yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan studi kepustakaan.

Metode Analisis Data

Data penelitian menggunakan metode deskriptif, yang dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk member gambaran penyajian laporan tersebut (Moleong, 2006:11). Metode kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, tindakan, persepsi, motivasi, tindakan, dll (Moleong, 2006:6)

4. Hasil dan Pembahasan Visi dan Misi Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022

Pemerintahan Aceh saat ini memiliki 15 program unggulan yang dijalankan dalam jangka waktu 5 tahun. Adapun 15 program unggulan tersebut muncul dari visi dan misi yang menjadi tuntunan pemerintah Aceh dalam meningkatkan serta memajukan Aceh dimasa mendatang. Visi dari pemerintah Aceh ialah "Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil, dan melayani". Adapun visi ini mengandung tiga unsur sebagai kata kunci yaitu: (1) Aceh yang damai, (2) Aceh yang sejahtera, (3) Pemerintahan yang bersih, adil, dan melayani.

Hasil Penelitian

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden disetiap SKPA dapat dirumuskan sesuai permasalahan. Jawaban-jawaban responden terkait pertanyaan penelitian dianalisis berdasarkan persamaan dan perbedaan jawaban

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh

Perencanaan adalah langkah awal yang dilakukan dalam penyusunan program dan kegiatan.

Peraturan mengenai perencanaan dalam penyusunan program atau kegiatan telah tertuang dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah daerah. Tak hanya itu, peraturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah juga telah mengamanatkan kepada seluruh SKPD untuk menyusun renstra yang berpedoman pada RPJM.

Berbicara mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Surianti dan Dalimunthe (2015) bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja di berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan implementasi penganggaran berbasis kinerja, baik di pemerintah pusat dan daerah masih belum sesuai dengan grand design yang telah ditentukan. Namun hasil penelitian tersebut berbanding terbalik pada penelitian yang dilakukan di pemerintah daerah Aceh. Seperti yang telah dijelaskan pada hasil penelitian diatas, bahwasanya semua program dan kegiatan yang disusun oleh SKPD harus mengacu pada RPJM yang telah disusun oleh gubernur. Proses dalam penyusunan anggaran pada pemerintah Aceh seperti yang dijelaskan pada hasil penelitian telah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan RPJM yang telah dibuat untuk tahun 2017-2022. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanda dan Darwanis (2016) bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja di departemen DPKKD Aceh Selatan telah berjalan dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri No.13 2006. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Aceh telah melaksanakan system anggaran berbasis kinerja dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan dasar hukum serta ketentuan yang berlaku.

Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan keuangan pemerintah Aceh dikatakan sangat baik juga karena dibuktikan dengan adanya LKJ Aceh yang di buat setiap tahunnya, guna menjadi

bahan evaluasi dan pelaporan tiap-tiap program/kegiatan pemerintah selama setahun berjalan. Tak hanya itu, renstra yang disusun oleh masing-masing SKPA juga telah mengandung visi, misi, tujuan, arah, serta kegiatan yang akan dicapai dalam waktu lima tahun kedepan. Kemudian terkait dengan penerapan ABK, semua SKPA telah menerapkan ABK sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan semua program/kegiatan itu telah terealisasi berdasarkan RPJM yang telah dirancang. Mengenai komponen ABK, yaitu indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja, semua SKPA telah memiliki dan menjalankannya karena hal tersebut merupakan patokan bagi SKPA dalam menjalankan program/kegiatan.

Pada proses penyusunan, seluruh SKPA mengacu pada Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Serta penerapan yang saat ini dijalankan pada pemerintah daerah Aceh mengikuti penerapan yang ditentukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kendala Pada Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh

Kualitas sumber daya manusia dari segi latar belakang pendidikan, pelatihan, serta pengalaman merupakan faktor yang penting guna meningkatkan kinerja anggaran pada pemerintahan daerah. Dalam penelitian Hidayati dan Ma'ruf (2015) Lima faktor penyebab keberhasilan penerapan PBK juga masih belum dilaksanakan dengan baik, sehingga menjadi kendala penerapan PBK yang belum maksimal.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan pada pemerintah Aceh, kendala yang dialami dalam penerapan anggaran berbasis kinerja ialah dalam hal sumber daya manusia yang masih memiliki kualifikasi yang rendah karena kebanyakan tenaga penyusun anggaran berbasis kinerja pada SKPA berlandaskan pada learning by doing. Tak hanya itu, penempatan ASN yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan menyebabkan keterbatasan pemahaman SKPA dalam penyusunan anggaran serta tidak tepatnya estimasi penganggaran. Sehingga, yang benar-benar memahami penyusunan

anggaran hanyalah pihak yang mengikuti pelatihan secara langsung maupun yang memiliki latar belakang sesuai dengan tugas dan pekerjaannya. Hal ini menyebabkan ASN atau individu terkait harus belajar secara mandiri serta membutuhkan waktu yang panjang untuk memahami tentang penganggaran yang benar. Hasil dari pendidikan/pelatihan yang telah diikuti mengenai perencanaan serta penyusunan anggaran adalah terealisasinya program/kegiatan yang direncanakan sebelumnya dengan kategori baik seperti yang disebutkan dalam LKJ Pemerintah Aceh. Seperti halnya yang telah dipaparkan diatas, perencanaan dan penyusunan sudah sangat matang dibuat dan direncanakan, namun ketika pelaksanaan baru munculnya kendala-kendala. Karena individu tersebut hanya memahami sebatas pemahaman saja, tidak dengan pelaksanaan, begitu pun sebaliknya. Jadi memungkinkan beberapa program/kegiatan tidak terlaksana sesuai target.

Mengenai sistem reward dan punishment, pemerintah Aceh juga belum menerapkan sistem ini, kecuali pada P2K dikantor gubernur. Serta dijelaskan bahwa hanya sebatas kode warna saja. Sebenarnya dengan adanya sistem reward dan punishment dapat menjadi motivasi bagi para SKPA untuk meningkatkan kinerja nya lebih maksimal lagi. Hasil penelitian pada penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanda & Darwanis (2016) yang menyatakan bahwa anggaran yang telah direncanakan dapat tidak diterapkan secara optimal, oleh karena itu hal tersebut berpengaruh terhadap penilaian kinerja. Kualitas sumber daya manusia tidak cukup optimal, meskipun sudah terwakili dan tanggung jawab yang rendah dari departemen kepegawaian untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tugas dan fungsi utama.

5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan anggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah Aceh maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimulai

dari perencanaan, penyusunan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi dari penerapan anggaran berbasis kinerja . Hal ini juga dibuktikan dari perencanaan mulai dari RPJMA yang mengacu pada RPJN hingga proses akhir terlahirnya DPA SKPA serta dengan Laporan Kinerja Pemerintah Aceh. Serta penerapan anggaran berbasis kinerja pada pemerintah Aceh telah mengikuti penerapan anggaran berbasis kinerja yang dikeluarkan oleh Bappenas, meliputi: (1) Penyusunan renstra, (2) Sinkronisasi, (3) Penyusunan kerangka acuan, (4) Penerapan indikator kinerja, (5) Pengukuran kinerja, dan (6) LAKIP.

2. Mengenai kendala yang dihadapi pada penerapan anggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah Aceh, penerapan anggaran berbasis kinerja tidak terlepas dari berbagai kendala yang harus dihadapi. Pertama, tidak adanya reward dan punishment yang diberikan dari pemerintah pusat guna meningkatkan kinerja dari masing-masing SKPA. Kendala selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang paham betul akan proses penyusunan anggaran tersebut.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian pada penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan menggunakan objek seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang dirasa sangat luas sehingga informasi yang diperoleh tidak terlalu mendetail hingga ke data-data pendukung.
2. Dikarenakan objek yang digunakan sangat luas, dan yang dilakukan adalah metode wawancara, maka waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini juga sedikit panjang dan memakan waktu yang lama serta peneliti agak kewalahan dalam melakukan penelitian. Dari keterbatasan yang disebutkan diatas, maka penulis merekomendasikan agar:
  - a. Mengambil objek yang lebih sempit lagi agar dapat memperoleh informasi yang mendalam dan mendetail didukung dengan data-data lainnya.
  - b. Serta dengan mengambil objek yang lebih sempit lagi juga dapat membantu peneliti

meminimalisir waktu dan melaksanakan penelitian dengan lebih maksimal lagi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah aceh, maka berikut saran yang diberikan oleh penulis:

1. Diharapkan pada peneliti selanjutnya mengambil objek yang merupakan pemerintahan kabupaten.
2. Pada penelitian selanjutnya ada baiknya peneliti selanjutnya mengangkat isu mengenai *E-Budgeting* yang merupakan perkembangan dari anggaran berbasis kinerja.
3. Kepada pemerintah sebaiknya perlu diadakannya dukungan berupa penghargaan (*reward*)/ hukuman (*punishment*) pada Satuan Kerja Perangkat Aceh atas pencapaian kinerja dalam pelaksanaan anggaran guna meningkatkan semangat dalam mengerjakan tugas dari pada individu yang terlibat dalam penerapan anggaran sehingga dapat memacu prestasi dan meningkatkan pekerjaan secara maksimal..

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukry. 2018. *Penganggaran Pemerintah Daerah: Regulasi, Teori, dan Praktek*. Universitas Syiah Kuala: Banda Aceh
- Aceh.tribunnews.com.2017. Aceh Utara Tak Disiplin Mengelola Keuangan.18 Juli. <http://aceh.tribunnews.com/2017/07/18/aceh-utara-tak-disiplin-mengelola-keuangan>.Diakses pada tanggal 25 Oktober 2018
- Aceh.tribunnews.com.2013. Mengelola Keuangan Aceh.18 Februari. <http://aceh.tribunnews.com/2013/02/18/mengelola-keuangan-aceh>. Diakses pada 25 Oktober 2018.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Afrizal, Muhammad Arfan, & Darwanis.2016. Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 5
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). 2008. *Pengukuran Kinerja, Suatu Tinjauan pada Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Badan Perencanaan dan Pemabngunan Nasional (BAPPENAS). 2009. *Pedoman Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja*. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Bungin, B.M.2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media
- Cresswell, J.W. 2013. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Third Edition*. California: Sage Publication Inc.
- Darise, Nurlan.2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Edisi Kedua. Jakarta:Indeks
- Djpk.kemenkeu.go.id. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah.Diakses pada 30 Oktober 2018
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah (Pedoman untuk Eksekutif dan Legislatif Rangkuman 7 Undang-Undang, 30 Peraturan Pemerintah dan 15 Permendagri)*. Edisi Kedua. Jakarta:Indeks
- Danila, Ova, Ridwan Ibrahim, & Syukry Abdullah. 2018 Analisis Determinan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Kabupaten Bener Meriah. Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 4
- Freeman, R. J., & Craig, D.S. (2003). *Governmental and Nonprofit Accounting-Theory and Practice*.Seventh Edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Irsyadi, Darwanis, & Muhammad Arfan.2017. Analisis Kinerja Satuan Perangkat Kerja Kota (SKPK) Pemerintah Kota Sabang. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Volume 6
- Kuncoro.M.2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi Ketiga:Jakarta
- Mahmudi.2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta :UPP STIM YKPN
- Mahsun,M. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:BFE Yogyakarta

- Mardiasmo. .2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung, Rosdakarya Bandung.
- Nanda, Reza dan Darwanis. 2016. Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mmahasiswa Ekonomi Akutansi (JIMEKA) Volume 1, Nomor 1 Tahun 2016*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*
_____, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
_____, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*
_____, *Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*
_____, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*
_____, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara*
_____, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
_____, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Sekretariat Daerah .*Qanun No.1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh*
- Sekaran, Uma. 2017. *Research Method for Bussiness: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Buku 1. Edisi 6. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. Terjemahan Kwan Men Yon. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Surianti, M., & Dalimunthe, A.R. .2015. The Implementation of Performance Based Budgeting in Public Sector (Indonesia Case: A Literature Review), *Research Journal of Financial and Accounting*, Vol. 6 No. 12. PP.198-211
- Ulum.MD.2009. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara